

## PERAN DINAS SOSIAL SAROLANGUN DALAM PEMBERDAYAAN SUKU ANAK DALAM (SAD) UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PRIMER

**Syahrowi\*, Awis Karni\*\* dan Irta Sulastri\*\*\***

\*Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: syahrowi1994@gmail.com

\*\*Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: awiskarni61@gmail.com

\*\*\*Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: irta\_sulastri64@gmail.com

### Abstract

*SAD is one of the groups that lives alternately in the forest, living in simple huts, wearing traditional clothes, and consuming forest products to survive. This has made the Sarolangun Social Service Office become concerned about SAD's less prosperous life. For this reason, the Sarolangun Social Service provides empowerment programs for SAD to improve their lives, especially in terms of meeting primary needs. This study aims to analyze the role of the Sarolangun Regional Government in empowering the primary needs of SAD in Lubuk Jering Village through several empowerment programs. This study has used a qualitative approach by interviewing 6 informants who can provide correct and clear information related to the focus of the research being carried out. The research findings have shown that the Sarolangun Social Service carries out an empowerment program through three stages, namely the stages of awareness, capacity building, and empowerment. The role of the Social Service in the awareness stage is to provide knowledge about the importance of wearing modern clothes, knowledge that they cannot depend on the forest forever, and insight into the importance of living permanently. The role of the Social Service at the capacitating stage is to provide training in farming and managing fish ponds, as well as mental development. The role of the Social Service in the empowerment stage is to provide assistance in the form of basic necessities and *jadup*, land for farming, fish ponds, wooden houses on stilts, and other supporting facilities.*

**Keywords:** Sarolangun Social Services; Empowerment; SAD; Primary Needs.

## Abstrak

SAD merupakan salah satu kelompok yang hidup secara berpindah-pindah dalam hutan, dengan tinggal di pondok sederhana, menggunakan pakaian adat, dan mengkonsumsi hasil hutan untuk bertahan hidup. Hal tersebut membuat Dinas Sosial Sarolangun menjadi prihatin dengan kehidupan SAD yang kurang sejahtera. Untuk itu Dinas Sosial Sarolangun memberikan program pemberdayaan kepada SAD untuk meningkatkan kehidupannya terutama dalam hal memenuhi kebutuhan primer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Sarolangun dalam memberdayakan kebutuhan primer SAD di Desa Lubuk Jering melalui beberapa program pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada 6 informan yang bisa memberikan informasi dengan benar dan jelas berhubungan dengan fokus penelitian yang dilakukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Sarolangun melakukan program pemberdayaan melalui tiga tahapan yaitu tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Peran Dinas Sosial pada tahapan penyadaran adalah memberikan pengetahuan tentang pentingnya memakai pakaian modern, pengetahuan bahwa mereka tidak bisa selamanya bergantung pada hutan, dan wawasan tentang pentingnya hidup menetap. Peran Dinas Sosial pada tahapan pengkapasitasan adalah memberikan pelatihan bercocok tanam dan mengelola kolam ikan, serta pembinaan mental. Peran Dinas Sosial pada tahapan pendayaan adalah memberikan bantuan berupa sembako dan jadup, lahan untuk bertani, kolam ikan, rumah kayu model panggung, dan fasilitas pendukung lainnya.

**Kata Kunci:** Dinas Sosial Sarolangun; Pemberdayaan; SAD; Kebutuhan Primer.

## PENDAHULUAN

Istilah pemberdayaan sudah menjadi pembahasan publik, bahkan sering dijadikan sebagai kata kunci (*key word*) untuk keberhasilan serta kemajuan dalam pembangunan masyarakat.<sup>1</sup> Model utama pemberdayaan mengarah pada proses pembangunan yang mendorong ide suatu masyarakat yang bermula dari bawah menuju ke atas (sejahtera). Pemberdayaan diberikan kepada masyarakat lemah atau masyarakat yang memiliki kekurangan akses sumber daya pembangunan yang dilakukan dengan cara meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup dan kemampuan masyarakat. Peningkatan kemampuan masyarakat yang rentan dan lemah melalui pemberdayaan bertujuan untuk: 1) memenuhi kebutuhan pokok (primer), artinya mereka memiliki *freedom* (kebebasan) dari kelaparan,

---

<sup>1</sup>Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Perkembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2011), hlm. 98.

bebas dari kesakitan serta bebas dari sifat kebodohan; 2) meningkatkan pendapatan ekonomi, maka perlu adanya jangkauan sumber produktif seperti barang dan jasa; 3) ikut serta dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.<sup>2</sup>

Salah satu kelompok masyarakat yang lemah atau kurang akses sumber daya pembangunannya adalah Suku Anak Dalam (SAD). SAD merupakan bagian dari beberapa komunitas yang tersebar di hutan Jambi, salah satunya SAD di Desa Lubuk Jering Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. SAD memiliki komunitas yang kecil, tertutup, homogen, hubungan sosialnya hanya dengan kerabat, hidup terpencil, sulit dijangkau, menggunakan peralatan sederhana, ketergantungan pada alam sangat tinggi, serta terbatas dalam mendapatkan layanan sosial, ekonomi, dan politik.<sup>3</sup>

SAD hidup secara berpindah-pindah di hutan dan mengenakan pakaian tradisional mereka<sup>4</sup>, yaitu bagi laki-laki memakai kancut (kain panjang yang dililitkan ke pinggang dan selangkangan), untuk kaum perempuan yang belum menikah mengenakan kain sarung yang dililitkan pada tubuh sebatas dada, sedangkan kaum perempuan yang sudah menikah memakai kain sarung yang dililitkan pada tubuh sebatas pinggul.<sup>5</sup> SAD memiliki filosofi hidup beratap *cikai*, ber dinding *benir*, bertikar *gambut*. Filosofi ini berarti bahwa SAD membuat tempat tinggal dengan atap terbuat dari daun, dinding dari pepohonan, dan lantai dari tanah.<sup>6</sup>

Rumah tradisional SAD dibuat bermacam-macam bentuk berdasarkan fungsinya. Rumah bolalapion, rumah sengsudungon, dan rumah di tano didirikan hanya untuk tempat berlindung sementara, sehingga bentuk dan bahan yang digunakan untuk membangunnya pun sederhana tanpa adanya dinding, sedangkan rumah godong dibangun untuk berlindung dalam jangka waktu lama.<sup>7</sup> Rumah godong merupakan rumah adat bagi

---

<sup>2</sup>Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Ravika Adimatama, 2005), Cet. I, hlm. 57-58.

<sup>3</sup>Nahri Idris, "Mengkaji Ulang Pola Komunikasi Pemerintah dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi", *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 21 No. 1*, (2017), hlm. 38.

<sup>4</sup>Wandi, "Konflik Sosial Suku Anak Dalam (Orang Rimba) di Provinsi Jambi", *Simulacra*, Vol. 2, No. 2, (2019), hlm. 198.

<sup>5</sup>Ermitati, "Pengungkapan Budaya Suku Anak Dalam Melalui Kosakata Bahasa Kubu", *Kandai*, Vol. 10, No. 2, (2014), hlm. 154-155.

<sup>6</sup>Ermitati, "Pengungkapan Budaya Suku Anak Dalam...", hlm. 162.

<sup>7</sup>Siti Tatmainul Qulub, "Konstruksi Ruang Gender pada Rumah Orang Rimba", *Musawa*, Vol. 15, No. 1, (2016).

SAD yang berfungsi sebagai tempat untuk berkumpul dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah.<sup>8</sup>

Dinamika kehidupan SAD tidak terlepas dari hutan, dan menjadi permasalahan ketika hutan sebagai ruang hidup mereka terus menerus tereksploitasi. Kehancuran hutan di provinsi Jambi, terutama di wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) dimulai pada tahun 1970-an pada masa pemerintahan Orde Baru yang mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Peristiwa ini menyebabkan krisis hutan dan fungsi hutan belantara di Jambi sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit berskala nasional. Akibatnya SAD mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber makanan dan air bersih di hutan. Karena selama ini SAD memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup dengan cara meramu, berburu, *betilik* (menangkap ikan dengan tuba)<sup>9</sup>, menjual hasil hutan seperti rotan dan damar di pinggir hutan, serta menukar hasil hutan dengan makanan ke masyarakat di desa terdekat.<sup>10</sup>

SAD yang terbiasa bergantung pada hasil hutan dan hidup berpindah-pindah akan mulai kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga kesejahteraan hidup SAD berkurang. Salah satu tujuan Negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Sosial Sarolangun perlu melakukan berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup SAD. Melalui Peraturan Menteri Sosial No. 12 Tahun 2015 terkait pemberdayaan sosial, menegaskan bahwa penerapan kesejahteraan sosial merupakan kegiatan yang terpadu, terarah, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, dan masyarakat dalam hal pelayanan sosial. Pemerintah dapat memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan primer yang mencakup kegiatan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Proses pemberdayaan dalam teori Randi R. Wrihatnolo dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahapan penyadaran, tahapan pengkapasitasan, dan tahapan pendayaan.

---

<sup>8</sup>Takidin, "Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Orang Rimba (Studi pada Suku Minoritas Rimba di Kecamatan Air Hitam Provinsi Jambi)", *Sosio Didaktika*, Vol. 1, No.2, (2014), hlm. 167.

<sup>9</sup>Ermitati, "Pengungkapan Budaya Suku Anak Dalam...", hlm.161

<sup>10</sup>Kasiono, "Potensi Usaha dan Pendidikan Kecakapan Hidup Berbasis Budaya (Mata Pencarian) Suku Anak Dalam", *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, (2018), hlm. 75.

Pada tahap penyadaran, masyarakat diberikan sosialisasi, pengetahuan atau wawasan agar mereka memahami bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tahap pengkapasitasan adalah tahap pemberian daya atau kuasa, artinya masyarakat yang diberdayakan harus mampu terlebih dahulu. Tahap pendayaan adalah tahap dimana masyarakat yang akan diberdaya diberikan daya, peluang, atau otoritas sesuai dengan kecakapan yang telah dimiliki oleh masyarakat selaku penerima daya.<sup>11</sup>

Pada tahun 1999/2000 pemerintah membuat program pembinaan pada masyarakat terasing yang disebut dengan Proyek Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT).<sup>12</sup> Pemerintah, Swasta, dan LSM telah bekerjasama dalam meningkatkan kehidupan SAD melalui beberapa program pemberdayaan. Program pemberdayaan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Sarolangun dalam memberdayakan SAD adalah proyek pemukiman kembali (*resettlement*), menumbuhkan kesadaran SAD tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan, serta menjelaskan bagaimana hubungan SAD dengan masyarakat luar.<sup>13</sup>

Fokus utama dalam pemberdayaan SAD adalah memberikan penyadaran untuk tinggal menetap di suatu kawasan. Pada tahap selanjutnya Dinas Sosial Sarolangun memberikan bimbingan dan pembinaan agama, mengenalkan budaya luar, serta memberikan pelatihan cara bercocok tanam dan berproduksi. Dengan bimbingan, pembinaan, dan pelatihan yang diberikan, diharapkan SAD dapat memahami dan menerapkannya. Selain itu, Dinas Sosial Sarolangun bekerja sama dengan sektor terkait dalam menyediakan rumah untuk SAD, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta menyediakan lahan bagi SAD untuk bercocok tanam.<sup>14</sup> Dinas Sosial Sarolangun juga memberikan jadup (jatah hidup) untuk SAD, bantuan peralatan untuk bekerja, serta pemberian bibit tanaman palawija dan pupuk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>Randi R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 2.

<sup>12</sup>Ani Mardiyati & Tri Gutomo, "Kemandirian dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 42(3): 263-273, (2018), hlm. 266.

<sup>13</sup>Rina Astarika, dkk, "Resistensi Program Pemberdayaan Pemukiman Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi", *Jurnal Etnorefika Vol.7 No. 3*, (2018), hlm. 147.

<sup>14</sup>Rina Astarika, dkk, "Resistensi Program...", hlm. 147.

<sup>15</sup>Dinas Sosial Sarolangun, *Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan KAT*, (Jambi: Dinas Sosial Provinsi Jambi, 2013).

Berdasarkan observasi di Kawasan Terpadu Madani Desa Lubuk Jering, terlihat beberapa rumah SAD kosong dan tidak terawat, serta sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial Sarolangun belum dimanfaatkan dengan baik oleh SAD. Dinas Sosial Sarolangun telah berupaya dalam memberdayakan SAD terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan primer melalui program pemberdayaan, akan tetapi program tersebut belum mencapai hasil yang optimal. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengungkap bagaimana peran Dinas Sosial Sarolangun dalam memberdayakan SAD untuk memenuhi kebutuhan primer? Masalah yang diungkap dalam tulisan ini adalah tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Sarolangun dalam memberdayakan SAD untuk memenuhi kebutuhan primer. Tulisan ini bertujuan untuk membuat deskripsi tentang peran Dinas Sosial Sarolangun dalam pemberdayaan SAD untuk memenuhi kebutuhan primer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif yaitu suatu metode yang dipakai dalam penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi atau data yang sewajarnya tentang masalah kehidupan pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi untuk menggambarkan peran Dinas Sosial Sarolangun dalam pemberdayaan SAD di Kawasan Terpadu Madani desa Lubuk Jering untuk memenuhi kebutuhan primer.

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan penentuan sampel dengan alasan tertentu, yaitu orang yang peneliti anggap mengerti tentang informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah KASI Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Sarolangun, Jenang di Kawasan Terpadu Madani desa Lubuk Jering, Tumenggung SAD, pemuda SAD, pengajar SAD, dan orang yang ikut terlibat dalam pembangunan rumah SAD.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati serta menulis secara sistematis fenomena yang akan diteliti. Wawancara ialah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi serta ide dengan cara melakukan tanya jawab, sehingga dapat dibangun suatu makna dalam suatu topik pembahsan tertentu. Sedangkan dokumentasi adalah teknik mengumpulkan

data yang menghasilkan data penting terkait masalah yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh data yang bukan berdasarkan perkiraan, akan tetapi data yang sah dan lengkap.

Pemilihan sampel atau informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu mengambil sampel dengan menetapkan sampel yang dianggap tahu dan paham mengenai penelitian yang akan dilakukan. Informan yang terpilih antara lain Dinas Sosial Sarolangun, Jenang, Tumenggung, SAD dan pihak yang terlibat dalam pemberdayaan SAD di Kawasan Terpadu Madani Desa Lubuk Jering, Data yang telah terkumpul kemudian diolah untuk mengambil kesimpulan. Data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi dianalisis dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu cara mengolah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata.

## PEMBAHASAN

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan potensi masyarakat, baik dalam hal memberikan pendapat, berpartisipasi, bernegosiasi, memenuhi kebutuhan, menentukan pilihan, maupun mengelola kelembagaan masyarakat.<sup>16</sup> Proses pemberdayaan dilakukan melalui beberapa tahapan. Salah satu teori yang membahas tentang tahapan pemberdayaan adalah teori Randy R. Wrihatnolo yang menjelaskan bahwa ada tiga tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu tahapan penyadaran, tahapan pengkapasitasan, dan tahapan pendayaan. Dinas Sosial Sarolangun merencanakan dan membuat beberapa program untuk memberdayakan SAD dalam memenuhi kebutuhan primernya. Program tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial Sarolangun dalam 3 tahapan pemberdayaan. Berikut dikemukakan hasil penelitian tentang ketiga tahapan tersebut.

### 1. Tahapan Penyadaran

Tahapan penyadaran dilakukan dengan memberikan sosialisasi, pengetahuan atau wawasan kepada SAD. Tahapan penyadaran akan membantu SAD yang tadinya hanya bergantung pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara berpindah-pindah di pondok-pondok kecil, perlahan-lahan ketergantungan tersebut mulai berkurang dan mereka bisa membiasakan diri untuk mulai menetap dan beradaptasi dengan masyarakat luar di sekitar mereka.

---

<sup>16</sup>Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 88.

Tahapan penyadaran di Kawasan Terpadu Desa Lubuk Jering sudah mulai terlihat dari beberapa orang SAD, salah satunya Malayau Tuah (Tumenggung SAD). Malayau Tuah, menyatakan: “yang kami harapkan untuk kedepannya, kami dan anak cucu kami dapat hidup layak seperti masyarakat desa lainnya”.<sup>17</sup> Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa mereka juga ingin hidup layak dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, akan tetapi mereka membutuhkan waktu yang lama dalam merubah kebiasaan yang telah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka.

Sejak nenek moyangnya, SAD sudah terbiasa hidup dan bergantung pada hasil hutan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka berburu hewan-hewan yang ada di hutan dan menuba ikan. Selain itu mereka juga mengambil hasil hutan seperti rotan dan umbi-umbian. Hasil yang mereka peroleh langsung mereka jual atau dikonsumsi sendiri. Pola pikir inilah yang membuat rendahnya kesadaran SAD tentang pentingnya etos kerja dan proses dalam melakukan suatu pekerjaan. Mereka hanya memikirkan setiap yang mereka kerjakan langsung mendapatkan hasil. Mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada generasi mereka selanjutnya jika hanya bergantung pada hasil hutan. Karena kawasan hutan akan mulai berkurang seiring dengan berkembangnya zaman, seperti untuk pembukaan lahan baik untuk perkebunan, perumahan, maupun kawasan industri.

Sekitar tahun 1980-an tahap penyadaran sudah mulai dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah. Tahapan penyadaran dilakukan melalui 2 cara, yaitu lisan dan tulisan dengan menggunakan bantuan media elektronik, dan media cetak. Penyadaran melalui lisan dilakukan dengan cara meminta SAD berkumpul di tempat yang sudah ditetapkan atau langsung mendatangi mereka ke hutan. Penyadaran melalui lisan dibantu oleh media elektronik seperti mikrofon dan alat penguat suara lainnya agar apa yang disampaikan dapat didengar dengan jelas oleh SAD. Sedangkan penyadaran melalui tulisan biasanya dibuat dalam bentuk selebaran dan dibagikan kepada SAD yang sudah mengenal tulisan dan mampu membaca.

Tahap penyadaran yang diberikan oleh Dinas Sosial Sarolangun kepada SAD di Desa Lubuk Jering terkait dengan pemenuhan kebutuhan primer adalah:

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Malayau Tuah, Tumenggung SAD di Desa Lbuk Jering, Desa Lubuk Jering, 22 September 2020.



- a. Penyadaran terkait kebutuhan sandang dengan mengingatkan SAD tentang pentingnya memakai baju yang menutup tubuh, diantaranya: untuk menutup aurat, serta untuk melindungi tubuh dari sinar matahari, hujan, hawa dingin, hawa panas, debu, dan kotoran yang bisa menimbulkan penyakit.<sup>18</sup> Pernyataan tersebut relevan dengan hasil penelitian Muhammad Ahad (2019) tentang Islamisasi Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun.<sup>19</sup>
- b. Penyadaran terkait kebutuhan pangan dengan memberikan wawasan bahwa tidak mungkin selamanya mereka akan bisa bergantung pada hasil hutan. Bisa saja hutan tempat mereka bergantung akan hilang atau ditebang karena pembukaan lahan baru. Selain itu, mereka juga diberikan penyadaran pentingnya untuk tahu cara bercocok tanam, mulai dari cara mengolah lahan, menanam, merawat, dan cara memanen.<sup>20</sup>
- c. Penyadaran terkait kebutuhan papan dilakukan dengan memberikan penyadaran kepada SAD untuk pentingnya hidup secara menetap.<sup>21</sup> Karena untuk mendaftarkan diri sebagai warga NKRI, maka harus memiliki alamat yang tetap untuk proses pembuatan KTP atau kartu identitas. Selain itu mereka akan merasa aman dan nyaman tinggal di rumah yang layak huni dari pada tinggal di pondok kecil beratap terpal secara berpindah-pindah.

Peran Dinas Sosial Sarolangun dalam memberikan penyadaran sudah bisa diterima oleh SAD, akan tetapi SAD belum bisa sepenuhnya menerapkan penyadaran yang telah diberikan oleh Dinas Sosial Sarolangun pada 2 aspek, yaitu kebutuhan pangan dan papan. Hal ini disebabkan karena mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya beberapa SAD kembali lagi ke hutan untuk mencari hasil hutan yang bisa mereka makan atau jual. Untuk menunjang proses tahapan penyadaran, maka Imron menyatakan bahwa proses pembelajaran pada SAD perlunya dikembangkan. Dengan berkembangnya proses pembelajaran SAD, diharapkan anak-anak dari SAD termotivasi untuk berubah, terutama dalam hal pemikiran mereka.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Jalaluddin, Jenang di Desa Lubuk Jering, 23 September 2020.

<sup>19</sup>Muhammad Ahad, "Islamisasi Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi", *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 9 (2): 174-188, (2019), hlm. 183.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Jalaluddin, Jenang di Desa Lubuk Jering, 23 September 2020.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Jalaluddin, Jenang di Desa Lubuk Jering, 23 September 2020.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Imron, Pengajar di Desa Lubuk Jering, 22 September 2020.

## 2. Tahapan Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan adalah tahapan pemberian daya atau kuasa kepada SAD. Pada tahapan ini, Dinas Sosial Sarolangun memberikan bimbingan, pembinaan, dan pelatihan kepada SAD untuk memenuhi kebutuhan primer. Penerapan tahapan pengkapasitasan sudah dilakukan sejak tahun 1990-an dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada SAD. SAD membutuhkan proses yang lama dan panjang untuk bisa menerapkan pelatihan dan pembinaan yang sudah diberikan oleh Dinas Sosial Sarolangun. Hal ini disebabkan karena pola pikir mereka yang jauh tertinggal dari pola pikir masyarakat pada umumnya.<sup>23</sup>

Pembinaan SAD sebenarnya sudah ada mulai dari Era Reformasi, akan tetapi untuk pembinaan tersebut sering terjadi kegagalan, karena SAD lebih suka hidup dengan caranya sendiri.<sup>24</sup> Tahapan pengkapasitasan yang diberikan oleh Dinas Sosial Sarolangun kepada SAD terkait dengan pemenuhan kebutuhan primer adalah:<sup>25</sup>

- a. Pengkapasitasan kebutuhan sandang sudah cukup dan tidak perlu lagi, karena sekitar tahun 1980-an, SAD sudah mulai memakai pakaian yang modern.
- b. Pengkapasitasan kebutuhan pangan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan berskala panjang tentang cara bercocok tanam, serta cara memelihara ikan di kolam.
- c. Pengkapasitasan kebutuhan papan dilakukan dengan cara memberikan SAD bimbingan mental agar mereka mau menempati rumah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Sarolangun di Kawasan Terpadu Madani desa Lubuk Jering. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih mereka agar bisa hidup secara menetap dan tidak berpindah-pindah lagi.

Bagi masyarakat umum, peran Dinas Sosial Sarolangun dalam memberikan pembinaan dan pelatihan sudah bisa diterima dan dilaksanakan dengan baik, akan tetapi beda halnya dengan SAD. SAD membutuhkan waktu yang lama dalam menerapkan pelatihan dan pembinaan yang telah diberikan. Hal ini disebabkan oleh pola pemikiran SAD yang berbeda dengan pemikiran masyarakat umum.<sup>26</sup> Untuk itu, Dinas Sosial

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Junaidi, KASI Dinas Sosial Sarolangun, 25 September 2020.

<sup>24</sup>Muhammad Ahad, "Islamisasi Suku Anak Dalam...", hlm.185.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Junaidi, KASI Dinas Sosial Sarolangun, 25 September 2020.

<sup>26</sup>Wawancara dengan Junaidi, KASI Dinas Sosial Sarolangun, 25 September 2020.

Sarolangun masih perlu memberikan bimbingan dan pelatihan secara terus-menerus untuk merubah pola pikir SAD menjadi lebih maju.

### 3. Tahapan Pendayaan

Untuk menunjang pelatihan dan pembinaan yang telah diberikan kepada SAD di Kawasan Terpadu Madani Desa Lubuk Jering, maka Dinas Sosial Sarolangun perlu melakukan tahapan pendayaan. Tahapan pendayaan dilakukan dengan memberikan SAD sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan serta bantuan dalam menunjang tahapan pelatihan dan pembinaan yang telah diberikan. Adapun sarana yang disediakan oleh Dinas Sosial Sarolangun dan sektor lainnya kepada SAD terkait dengan pemenuhan kebutuhan primer adalah:

- a. Pada aspek kebutuhan sandang, Dinas Sosial Sarolangun bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam menyediakan pakaian untuk anak pada usia sekolah.
- b. Pada aspek kebutuhan pangan, Dinas Sosial Sarolangun bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyediakan lahan 10 Ha untuk bercocok tanam kepada SAD. Akan tetapi lahan tersebut belum diserahkan kepada SAD, karena sebelumnya SAD sudah pernah diberikan lahan tetapi lahan tersebut mereka jual. Selain itu, Dinas Sosial Sarolangun juga menyediakan kolam ikan dan memberikan bantuan berupa jadup (jatah hidup) dan sembako kepada SAD.<sup>27</sup> Untuk jangka waktu pemberian tidak ditetapkan, karena tergantung dengan dana yang tersedia.

**Tabel 1. Pemberian Jadup dan Sembako di Kawasan Terpadu Madani  
Desa Lubuk Jering tahun 2019**

No	Bantuan	Tanggal
1	Jadup	25 - 26 Maret 2019
2	Jadup	9 - 10 April 2019
3	Jadup	6 - 7 Mei 2019
4	Lampu listrik tenaga surya dan jadup	17 - 18 Mei 2019
5	Jadup	13 - 14 Agustus 2019
6	Jadup	30 - 31 Oktober 2019
7	Jadup dan sembako	Desember 2019

(Sumber: Surat Pertanggungjawaban Belanja Dinas Sosial Sarolangun 2019)

<sup>27</sup>Wawancara dengan Junaidi, KASI Dinas Sosial Sarolangun, 25 September 2020.

- c. Pada aspek kebutuhan papan, Dinas Sosial Sarolangun bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, serta Menteri Perumahan dan Pemukiman (Perkim) dalam menyediakan rumah untuk SAD di Kawasan Terpadu Madani desa Lubuk Jering. Perumahan tersebut mulai dibangun pada tahun 2018 dengan bantuan TNI AD Kodam II Sriwijaya. Rumah yang dibangun adalah rumah kayu model panggung tipe 28 sebanyak 57 rumah. Ada sedikit perbedaan dalam membangun rumah tumenggung dengan rumah warga SAD, yaitu pada bagian atapnya. Kerangka atap rumah tumenggung terbuat dari kayu dan atapnya dari finil, sedangkan untuk kerangka atap rumah warga SAD terbuat dari rangka baja ringan dan atapnya menggunakan multi pasir.<sup>28</sup> Akan tetapi rumah yang telah disediakan tersebut mulai lapuk, karena kayu yang digunakan saat membangun menggunakan kayu kualitas standar ke bawah dan kebanyakan rumah jarang ditempati SAD.

## SIMPULAN

Kehidupan SAD sangat jauh dari kata sejahtera, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan primer. Untuk itu Dinas Sosial Sarolangun memberikan pemberdayaan kepada SAD untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Peran Dinas Sosial Sarolangun dalam pemberdayaan SAD dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu tahapan penyadaran, tahapan pengkapasitasan, dan tahapan pendayaan.

Dinas Sosial Sarolangun melakukan penyadaran kepada SAD dengan memberikan pengetahuan, wawasan, dan arahan dalam pemenuhan kebutuhan primer SAD. Tahapan penyadaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Sarolangun diantaranya memberikan pengetahuan tentang pentingnya untuk menutup tubuh agar terhindar dari penyakit dan untuk beradaptasi dengan masyarakat sekitar, mengingatkan SAD bahwa mereka tidak bisa selamanya bergantung pada hasil hutan, serta memberikan pengetahuan untuk mulai hidup menetap agar bisa hidup dengan aman, nyaman dan mudah jika ada pendataan dari pemerintah.

Tahapan penyadaran dapat dioptimalkan dengan melakukan tahapan pengkapasitasan. Tahapan pengkapasitasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Sarolangun kepada SAD berupa pelatihan dan pembinaan kepada SAD, diantaranya pelatihan cara

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Triass, Pekerja yang memasang atap rumah SAD di Kawasan Terpadu Madani Desa Lubuk Jering, langsung, 1 27 September 2020.

bercocok tanam dan mengelola kolam ikan, serta pembinaan mental untuk menempatkan SAD ke rumah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Tahapan terakhir yang dilakukan Dinas Sosial Sarolangun dalam memberikan pemberdayaan kepada SAD adalah tahapan pendayaan. Pada tahapan pendayaan, Dinas Sosial Sarolangun bekerja sama dengan sektor pemerintahan lainnya dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk SAD, diantaranya menyediakan pakaian untuk SAD yang masih usia sekolah, bantuan jadup dan sembako, lahan untuk bercocok tanam, kolam ikan, serta rumah kayu model panggung dengan tipe 28 sebanyak 57 rumah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahad, Muhammad. 2019. "Islamisasi Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi." *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 9 (2): 174-188.
- Astarika, Rina, dan Partini, Endang Sulastri. 2018. "Resistensi Program Pemberdayaan Pemukiman Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi." *Jurnal Etnorefika* 7 (3)
- Ermitati. 2014. "Pengungkapan Budaya Suku Anak Dalam Melalui Kosakata Bahasa Kubu." *Kandai* 10 (2): 153-164.
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Perkembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Idris, Nahri. 2017. "Mengkaji Ulang Pola Komunikasi Pemerintah dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi." *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 21 (1).
- Kasiono. 2018. "Potensi Usaha dan Pendidikan Kecakapan Hidup Berbasis Budaya (Mata Pencarian) Suku Anak Dalam." *Jurnal Ilmiah Dikdaya*: 74-91.
- Mardiyati, Ani, dan Tri Gutomo. 2018. "Kemandirian dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 42(3): 263-273.
- Qulub, Siti Tatmainul. 2016. "Konstruksi Ruang Gender pada Rumah Orang Rimba." *Musāwa* 15(1).
- Sarolangun, Dinas Sosial. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan KAT*. Jambi: Dinas Sosial Provinsi Jambi.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugarto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, Cet. I*. Bandung: Ravika Adimatama.
- Takidin. 2014. "Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Orang Rimba (Studi pada Suku Minoritas Rimba di Kecamatan Air Hitam Provinsi Jambi)." *Sosio Didaktika* 1(2): 161-169.
- Wandi. 2019. "Konflik Sosial Suku Anak Dalam (Orang Rimba) di Provinsi Jambi." *Simulacra* 2(2): 195-207.
- Wrihatnolo, Randi R. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wawancara dengan Imron, Pengajar di Desa Lubuk Jering, 22 September 2020.
- Wawancara dengan Jalaluddin, Jenang di Desa Lubuk Jering, 23 September 2020.
- Wawancara dengan Junaidi, KASI Dinas Sosial Sarolangun, 25 September 2020.
- Wawancara dengan Malayau Tuah, Tumenggung SAD di Desa Lbuk Jering, 22 September 2020.
- Wawancara dengan Triass, Pekerja yang memasang atap rumah SAD di Kawasan Terpadu Madani Desa Lubuk Jering, 27 September 2020.